KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Tetap Ngotot Bangun Gedung Baru
Tanggal : Jumat, 22 September 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Kajian Kementerian PU-Pera menyatakan gedung DPR tidak miring. DPR mengklaim sudah mendapat lampu hijau dari Presiden untuk membangun kawasan parlemen.

DPR Tetap Ngotot Bangun Gedung Baru

Astri Novaria
astri@mediaindonesia.com

SEKRETARIS Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Ahmad Djuned, membenarkan hasil audit Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) yang mengatakan gedung DPR saat ini tidak miring. Namun, ada kerusakan parah sehingga gedung harus segera diperbaiki.

"Alhamdulillah hasil audit dari struktur Gedung DPR pascagempa (2009) hasilnya tidak ada kemiringan," ujar Djuned dalam Seminar Nasional: Rencana Pengembangan Kawasan Parlemen: Pembangunan Alun-alun Demokrasi dan Gedung DPR, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Rabu (20/9).

"Ada keretakan dari lantai 5 sampai 23 dan juga ada pembatasan beban agar setiap meter persegi tidak lebih dari 200 kg. Itu rekomendasi PU-Pera. Dengan adanya retakan-retakan dan pembebanan yang terlalu *over*, kami berkeinginan untuk melakukan pembangunan gedung ini," imbuhnya.

Hal itu, lanjutnya juga sudah sesuai Perpres Nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara. Bahkan, DPR mengklaim sudah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan pembangunan kawasan parlemen, Maret 2015 lalu.

"Pada prinsipnya, Presiden telah menyetujui rencana pembangunan gedung dalam rangka penataan kompleks parlemen sebagai suatu kesatuan yang utuh," pungkasnya.

Selain membangun gedung baru, DPR juga berencana membuat Alun-Alun demokrasi yang pada 2016 lalu dianggarkan senilai Rp500 miliar. Nantinya, Alun-Alun Demokrasi dimaksudkan untuk menampung pengunjuk rasa yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada para wakil rakyat.

Di kesempatan yang sama, anggota DPR periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dedi Gumelar, meminta masyarakat untuk tidak antipati. "Kalau anggota dewan betul-betul kerja, tidak bakal sempat renang apalagi spa karena harus hadir di dua sidang dalam waktu yang sama," ujar Dedi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/9).

Syarat keselamatan

Permintaan DPR untuk memiliki fasilitas baru itu pun mendapat persetujuan dari Kementerian PU-Pera. Plt Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU-Pera, Jonny Zainuri Echsan, menilai gedung DPR saat ini belum memenuhi syarat keselamatan, kesehatan, kemudahan atau aksesibilitas penghuninya.

"Keselamatan tidak hanya dilihat dari struktur, tapi juga dari gedung itu mampu memprediksi bahaya, kebakaran misalnya. Kalau dulu (2009) saat gempa ketika melewati jalur evakuasi yang lewat hanya 800 orang, sekarang yang turun lebih dari 5.000 orang," ujar Jonny, di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Rabu (20/9).

Di lain pihak, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai DPR harus menentukan skala prioritas dalam setiap rencana penataan kompleks parlemen. DPR harus bicara rencana besar dalam pembangunan itu, bukan hanya berkutat pada hal-hal remeh seperti membuat kolam renang atau tempat fitnes sehingga menyulut amarah publik.

"Sekarang terjadi hal yang sama, tiba-tiba anggota DPR bilang butuh apartemen. Ini justru mereproduksi kebencian publik kepada mimpi dari DPR," tandasnya. (P-5)